**Jurnal Administrasi Publik:
*Public Administration Journal***

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang
Political Development of Halal Tourism in Sabang City

Mau Lida Ulfa^{1)*}, Heri Kusmanto²⁾ & Warjio²⁾

¹⁾ Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: Juni 2019 Dipublish: Juni 2019

*Corresponding email:maulidaufaufa@gmail.com

Abstrak

Studi ini merupakan studi tentang politik pembangunan wisata halal di Kota Sabang. Fokusnya menganalisis tentang aktor politik pembangunan wisata halal di Kota Sabang, strategi serta peluang dan tantangannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Temuan studi ini antara lain terdapat tiga hal penting di dalamnya. Pertama, aktor politik pembangunan yang terlibat dikategorikan ke dalam tingkat nasional, individu (nasional), lokal (provinsi Aceh), individu (provinsi Aceh), lokal (Sabang), individu (Sabang), serta swasta (Sabang). Kedua, para aktor yang terlibat menggunakan strategi politik pembangunan dengan pendekatan campuran. Ketiga, para aktor melihat besarnya peluang dalam membangun wisata halal di Kota Sabang serta adanya tantangan yang harus segera diatasi untuk mewujudkan hal tersebut.

Kata Kunci: Wisata Halal, Strategi Politik Pembangunan, Aktor Politik, Sabang.

Abstract

This study is about political development of halal tourism in Sabang city. The focuses of this study are to analyze the actors of political development of halal tourism in Sabang city, the strategy, also the chances and challenges. The method used is a qualitative method. The findings of this study, among others, there are three important points. First, the actors of political development who involved are categorized at the national, Individual (national), Local (Aceh Province), Individual (Aceh Province), Local (Sabang), Individual (Sabang), and Private (Sabang) levels. Second, the actors who involved use a political development strategy with a mixed approach. Third, the actors see the magnitude of opportunities in building halal tourism in Sabang city and also the challenges that must be overcome immediately to manifest this.

Keywords: Halal Tourism, Strategy of Political Development, Actors of Politics, Sabang.

How to Cite: Ulfa, M.L. Kusmanto, H. & Warjio. (2019). Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*. 9 (1): 75-84

PENDAHULUAN

Awal mula dijadikannya Kota Sabang sebagai destinasi wisata halal, tentu tidak terlepas dari program yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI). Pada tahun 2013, Kemenpar RI menetapkan 13 provinsi unggulan destinasi wisata halal, salah satunya Provinsi Aceh. Tentu saja Kota Sabang sebagai bagian dari Aceh, turut membangun wisata halal di kotanya. Dengan segala potensi wisata yang ada baik wisata bahari dan serta wisata alam yang menawan, Kota yang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia ini telah berhasil menarik banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung.

Selain itu, berbagai pembangunan telah banyak dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Seperti terus melakukan pembenahan terhadap berbagai objek wisata pantai dan hutan wisata serta objek wisata seperti Tugu 0 km, dan membangun tempat penginapan seperti hotel, home stay dan resort. Masyarakat lokal Sabang yang ramah dan kental dengan kearifan budaya lokalnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai beragama, tentunya akan menyajikan pengalaman tersendiri yang menakjubkan. Terlebih lagi sektor pariwisata telah menjadi jantung perekonomian masyarakat Kota Sabang. Maka dari itu, sektor pariwisata di kawasan ini menjadi tonggak utama yang kian digiatkan pertumbuhannya.

Dalam tiga tahun belakangan, Kota ini gencar menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata halal. Selain daripada mengikuti program yang dibuat oleh Kemenpar RI, tentunya menarik menelaah mengenai wisata halal yang dibangun di Kota ini, mengingat daerah ini yang merupakan bagian dari Aceh, tentu lekat dengan syariat Islamnya. Terlebih lagi muncul wacana di masyarakat yang mengatakan bahwa apalagi yang harus dihalalkan dari Aceh yang memang sudah halal.

Belakangan ini eksistensi wisata halal semakin dilirik mengingat pangsa pasarnya yang menjanjikan. Hal ini melihat dari populasi muslim dunia sebanyak 1.8 miliar atau sekitar 28 persen dari total populasi dunia yakni sebesar 6.4 miliar yang tersebar di 148 negara. Apalagi jika melihat jumlah penduduk negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI adalah 1,2 miliar atau 20 persen dari populasi penduduk dunia, yang merupakan negara kaya dengan tingkat GDP per kapita yang besar (Sofyan, 2011). Maka, betapa besar pendapatan yang diperoleh sebuah negara jika berhasil menggaet penduduk Muslim (terutama Timur Tengah) untuk berkunjung menikmati fasilitas wisata halal yang ditawarkan.

Melihat prospek menjanjikan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kemenpar RI sejak tahun 2014 berkomitmen membangun sektor wisata halal, yaitu dalam mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia (Djakfar, 2017). Keseriusan pemerintah mulai terlihat nyata yakni dengan memenangkan Kompetensi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) 2016 dan Kompetensi Pariwisata Halal Internasional "World Halal Tourism Awards" (WHTA) 2016 yang diselenggarakan oleh International Travel Week (ITW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) (Rahmadhani, et al. 2017).

Perkembangan wisata halal yang semakin pesat tentu memerlukan payung hukum yang mengaturnya. Adapun mengenai wisata halal di Indonesia, diatur melalui fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kemudian provinsi Aceh sebagai daerah destinasi unggulan wisata halal, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun

2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal. Sebelumnya, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kepariwisata, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata halal. Adapun pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Adapun wisata halal di Kota Sabang mulai diresmikan sejak tahun 2016. Mengenai hukum yang mengaturnya, hanya mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi Aceh. Belum ada Qanun yang diterbitkan oleh pihak pemerintah Kota Sabang untuk mengatur wisata halal di Kotanya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Sabang, Yakob (2018), menuturkan bahwa pihaknya telah mengajukan draft rancangan Qanun Wisata Syariah tahun 2018, namun belum ada kejelasan lebih lanjutnya.

Mengenai konsep wisata halal, Kemenpar RI merujuk pada enam indikator yang dikeluarkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI), yaitu makanan halal (halal food); fasilitas sholat (prayer facilities); kamar mandi dengan air untuk berwudhu (water-friendly washroom); pelayanan saat bulan Ramadhan (ramadhan services); tidak boleh adanya kegiatan yang nonhalal (no nonhalal activities); serta fasilitas rekreasi dan pelayanan privat/tidak bercampur baur secara bebas (recreational facilities and services with privacy) (IMTI, 2018).

Konsep mengenai wisata halal erat kaitannya dengan Islam dan brand halal yang merefleksikan identitas dan gambaran seluruh muslim (Scott dan Jafari, 2010; Zamani Farahani dan Henderson,

2010, dalam Haq, 2013). Selain itu, wisata halal merujuk pada ketentuan produk wisata dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim untuk memfasilitasi kebutuhan akan ibadah dan makanan yang sesuai dengan ajaran Islam (Mohsin et al. 2015). Dasar dari wisata halal itu sendiri mencakup komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, perbankan Islam, paket perjalanan Islam, dan halal spa (Razalli, Abdullah, & Hasan, 2012, dalam El-Gohary, 2015).

Berbicara mengenai wisata halal di Kota Sabang, maka akan membahas mengenai para aktor politik pembangunan yang terlibat sebagai pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, serta pelaksana dan pendorong sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Selain itu, penting untuk melihat pendekatan dalam strategi politik pembangunan yang digunakan para aktor yang terlibat. Kemudian, dalam membangun wisata halal di Kota Sabang, akan dilihat dari berbagai peluang yang ada serta tantangan yang harus dihadapi oleh para stakeholder untuk mewujudkan wisata halal di Kota Sabang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo, 2011). Penelitian kualitatif akan bertumpu pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan juga rinci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian observasi lapangan terutama wawancara mendalam dengan berbagai aktor politik yang terlibat serta penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen maupun referensi terkait. Sehingga diperoleh

gambaran ataupun informasi yang dibutuhkan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor Politik Pembangunan Wisata Halal

Aktor politik pertama yaitu aktor politik pembangunan Nasional, yakni Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI) yang mana peran dari aktor ini ialah mengembangkan berbagai daerah yang memiliki potensi wisata. Melihat Aceh yang memiliki banyak potensi wisata baik wisata bahari, wisata religi, dan budaya lokal Aceh yang menakjubkan serta kental dengan syariat Islam sejak dahulu menjadi alasan Kemenpar RI – sebagai perumus kebijakan dan penyelenggara program pemerintah tersebut – untuk menetapkan Aceh masuk ke dalam 13 provinsi yang menjadi destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Lebih lanjut, salah seorang pembicara dari Kemenpar RI dalam workshop Pengembangan Destinasi Wisata Halal, menyebutkan yang intinya bahwa Aceh mempunyai ruh sebagai destinasi wisata halal, yang mana brandingnya kuat, tinggal dikembangkan, dimana potensinya berupa wisata religi, alam, dan tsunami (Disbudpar Aceh, 2016). Maka, Pulau Weh dengan ibuKotanya Sabang pun turut ikut serta membangun wisata halal di daerahnya.

Aktor politik kedua yaitu aktor politik pembangunan individu (nasional), yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Uama Indonesia (LPPOM MUI) yang mana peran daripada MUI sebagai mitra pemerintah pusat dalam mendukung wisata halal adalah dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN/-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun prinsip umum dalam yang diatur dalam fatwa ini yakni penyelenggaraan pariwisata syariah wajib: 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemaafsadatan, tabdzir/israf,

dan kemunkaran; serta 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Sedangkan LPPOM MUI memiliki peran dalam mengaudit dan melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.

Aktor politik ketiga yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Provinsi Aceh) yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang mana peran aktor ini ialah membangun kebudayaan dan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah dengan tidak melupakan pembangunan karakter masyarakat (character building), serta melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam membangun wisata halal, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani (2018), bahwa pihaknya turut aktif dalam mengadakan sosialisasi, serta memiliki tim pengembangan wisata halal Aceh, dan juga telah bekerjasama dengan BPOM/LPPOM, pemerintah, dinas, lembaga dan pihak lain yang terkait. Selain itu, peran dinas ini lebih kepada kebijakan atau memberikan fasilitas.

Aktor politik keempat yaitu Aktor politik pembangunan individu (Provinsi Aceh) yakni MPU Aceh/LPPOM MPU Aceh yang mana peran daripada MPU Aceh dalam membangun wisata halal berdasarkan wawancara dengan Syukri (2018) bahwa pihaknya melaksanakan sosialisasi yang bekerjasama dengan pihak Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Pariwisata, Wilayatul Hisbah dalam rangka melaksanakan, menegakkan dan mengembangkan wisata halal. Dalam hal memberikan saran agar terwujudnya wisata halal di Aceh, pihaknya juga telah memberikan wasiat bagi pemerintah misal dalam hal berbusana di pantai, dimana jika mandi bertelanjang atau berbikini di pantai itu hukumnya haram, atau hanya berupa memberikan fatwa-fatwa saja. Sedangkan peran LPPOM MPU Aceh ialah mengeluarkan sertifikat halal terhadap berbagai produk makanan, obat-obatan

maupun kosmetika, sebagai salah satu indikator penting dalam wisata halal.

Aktor politik kelima yaitu Aktor politik pembangunan individu (Provinsi Aceh) yakni Tim Percepatan Wisata Halal, yang mana peran dari aktor ini adalah melakukan percepatan pembangunan wisata halal dalam rangka mendukung destinasi halal Aceh dalam skala global dengan branding “the light of Aceh” yang merepresentasikan spirit dalam bingkai rahmatan lil’alamiin.

Aktor politik keenam yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Kota Sabang) yakni WaliKota/Wakil WaliKota Sabang yang mana peran daripada aktor ini dalam membangun wisata halal di Kota ini berdasarkan hasil wawancara dengan WaliKota Sabang Nazaruddin (2018) bahwa pihaknya dalam mengkonsep wisata halal sedang dalam tahap pembuatan dan musyawarah dengan ulama, yang mana nantinya juga akan disesuaikan dengan nilai kearifan lokal. Bukan hanya dari sisi makanan saja, namun juga kebersihan, dan penekanan harga. Sedangkan menurut Wakil WaliKota Sabang Suradji (2018) bahwa wisata halal di Sabang masih proses, sekitar tahun 2016. Namun Aceh yang sudah mayoritas Islam maka apa yang diperbuat semuanya sudah halal, tidak perlu diragukan. Tetapi, penyampaian berupa kemasan yang belum ada, seperti pamflet, baliho, stiker, dan yang lainnya, karena anggapan bahwa Sabang umumnya adalah warga muslim dan sudah pasti halal.

Aktor politik ketujuh yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Kota Sabang) yakni Disparbud Sabang yang mana perannya dalam membangun wisata halal menurut Faisal (2018) selaku Kepala Dinas menjelaskan bahwa pihaknya juga membantu pemerintah provinsi dalam hal mensosialisasikan kepada wisatawan dan juga masyarakat mengenai upaya ditingkatkannya wisata halal. Bukan hanya dari segi makanan saja, tetapi dari cara penyajiannya, dari segi wisata seperti

tempat penginapan yang halal bagaimana, maupun infrastrukturnya pendukungnya.

Aktor politik kedelapan yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Kota Sabang) yakni Dinas Syariat Islam/Satpol PP WH Kota Sabang yang mana peran Dinas Syariat Islam dalam hal ini menurut wawancara dengan Marwan (2018) selaku Kadis ialah pihaknya melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan pelatihan, pertemuan, namun penyuluhan mengenai wisata halal belum dibuat. Akan tetapi telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak pariwisata provinsi yang bekerja sama dengan pihak Dinas Syariat Islam Kota Sabang, juga MPU Kota Sabang dan Disparbud Kota Sabang, dimana yang paling berperan ialah cafe atau tempat makan. Materi penyajian lebih kepada kategori makanan halal dan cara penyajiannya. Sedangkan peran Satpol PP WH menurut Adi (2018) selaku kepala satuan ialah pihaknya melakukan pengawasan, pembinaan, dan advokasi spiritual.

Aktor politik kesembilan yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Kota Sabang) yakni DPRK Sabang yang mana peran dari aktor ini dalam membangun wisata halal menurut Albina (2018) ialah segala sesuatu yang disiapkan oleh pemerintah akan pihaknya proses. Sudah dicoba untuk dibuat Qanun mengenai wisata halal Sabang, namun sampai saat ini belum ada keberlanjutannya. Konsep wisata halal yang bagaimana yang ditawarkan di Sabang –walaupun pihaknya tidak menyebut wisata halal – adalah lebih dalam rangka implementasi nilai-nilai budaya lokal, wisata syariahnya, serta profesionalisme dalam kepariwisataan yang sesuai dengan kulturlokal.

Aktor politik kesepuluh yaitu Aktor politik pembangunan lokal (Kota Sabang) yakni BPKS yang mana perannya ialah meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk memajukan dan

mengelola kawasan Sabang (BPKS, 2019). Berdasarkan wawancara dengan Fauzi (2018), sebagai upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sabang, pihak Kemenpar RI bersama pemerintah Aceh, pemerintah Kota Sabang, dan BPKS, mengadakan event Marine Sabang yang telah dimulai sejak tahun 2016 dalam memperkenalkan kotanya sebagai destinasi wisata bahari yang unggul. Adapun sebagai tempat kunjungan para wisatawan, tentunya pelabuhan Balohan Sabang menjadi titik penting.

Aktor politik kesebelas yaitu aktor politik pembangunan individu (Kota Sabang) yakni MPU Kota Sabang yang mana perannya menurut Yakob (2018) ialah pihaknya sebagai mitra kerja pemerintah daerah, pihaknya akan memberikan saran maupun pemikiran baik dalam bentuk Qanun, tausiyah. Pihaknya juga juga sering melakukan sosialisasi tentang wisata halal, melalui kunjungan langsung ke seluruh kampung dan memberikan informasi bagaimana wisata halal itu; dan juga melalui brosur, kalender, serta baliho tentang hukum Qanun dan fatwa yang berkaitan dengan wisata halal. Selain itu mengenai kejelasan hukum yang mengatur mengenai wisata halal di Kota ini, pihaknya telah mengajukan draft rancangan Qanun Kota Sabang tentang wisata syari'ah yang dibuat pada tahun 2017. Tetapi sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut. Namun belum konkret istilah yang akan digunakan apakah wisata Islami, wisata syari'ah, atau wisata halal.

Aktor politik duabelas yaitu aktor politik pembangunan individu (Kota Sabang) yakni Majelis Adat Aceh yang mana perannya berdasarkan wawancara dengan Sulaiman (2018) bahwa pihaknya berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengajak bagaimana caranya menjaga wisata halal, termasuk di dalamnya produk-produk makanan halal yang mendukung pariwisata itu. Peran MAA hanya sebatas sosialisasi.

Aktor politik ketigabelas yaitu politik pembangunan individu (Kota Sabang) yakni Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Sabang yang mana perannya berdasarkan wawancara dengan Nani (2018) bahwa pramuwisata ibaratkan ujung tombak yang dari pariwisata atau pemandu wisata inilah yang termasuk bekerja di lapangan yang menentukan wisata tersebut halal atau tidak. Peran pramuwisata/pemandu sangat besar, misalnya dalam membawa tamu dan mengarahkan tamu agar tidak lupa waktu sholat saat liburan.

Aktor politik keempatbelas yaitu aktor politik pembangunan individu (Kota Sabang) yakni Forum Komunitas Hijau (FKH) Teurawah yang mana peran aktor ini berdasarkan wawancara dengan Fatwa (2018) bahwa forum ini merupakan binaan dari kementerian PUPR. Pihaknya saat ini berkonsentrasi pada bagian kebersihan Kota Sabang, mengubah perilaku, membuat management bagi dinas kebersihan pemerintah, mengelola satu destinasi, dan juga menjadi konsultan.

Aktor politik kelimabelas yaitu aktor politik pembangunan individu (Kota Sabang) yakni Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Kota Sabang, berdasarkan hasil wawancara dengan Zahri (2018) ialah kelompok yang terdiri dari pemuda-pemudi gampong yang didanai oleh APBG (dana gampong). Pemerintah Kota melalui Disparbud Kota Sabang memberikan pelatihan terhadap pengurus Pokdarwis, dan juga membantu sarana dan prasarana terhadap kemajuan wisata di gampong masing-masing. Pokdarwis ini merupakan bagian dari peran serta masyarakat terhadap kemajuan wisata di daerahnya. Adapun yang dilakukan oleh pokdarwis adalah berupa pembenahan destinasi baru di masing-masing gampong. Misalnya saja yang dilakukan oleh Pokdarwis daerah Krueng Raya adalah membersihkan pantai dan membuat tempat duduk, juga mengarahkan masyarakat untuk membuat

homestay bagi mereka yang memiliki kamar lebih yang dapat disewakan.

Aktor politik keenambelas yaitu Aktor politik pembangunan swasta (Kota Sabang) yakni pelaku travel yang mana perannya sebagai penyedia jasa perjalanan wisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Aktor ini sebagai bagian dari pengusaha yang turut mendorong kegiatan pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan Irwan (2018) selaku pelaku travel Gadeng Wisata bahwa Sabang belum mengarah ke wisata halal, Qanun wisata, perwal, dan arah wisata pun belum ada. Kalaupun ada Qanun, sepertinya masih jauh pembicaraannya dari wisata halal. Tetapi pihaknya sebagai pelaku, hanya bisa mengatakan bahwa paket-paket wisata yang dijual, kegiatan-kegiatan wisata yang dilakukan, pihaknya selalu menghindari yang namanya hal-hal yang tidak diterima oleh masyarakat. Peran pihaknya ketika membuat tur, paket wisata, berusaha agar tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan masyarakat. Paket wisatanya seperti snorkling, diving, kalau untuk budaya kurang diminati di Sabang.

Aktor politik ketujuhbelas yaitu Politik pembangunan swasta (Kota Sabang) yakni pengelola penginapan yang mana aktor ini sebagai pihak swasta yang turut mendorong kegiatan pembangunan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sahrul (2018) selaku pemilik Sabang guest house, bahwa dirinya beragama Islam dan tidak mungkin tidak halal. Bagi tamu yang berpasangan jika ingin menginap, pihaknya akan memeriksa buku nikah dan KTP, bagi wisman akan diperiksa paspornya. Untuk masalah berpakaian, diminta agar berpakaian sopan saat keluar dari kamarnya. Masalah fasilitas di kamar, terdapat petunjuk arah kiblat, sedangkan untuk mukena dan Al-Qur'an, dapat diminta langsung kepada dirinya dan akan disediakan.

Para aktor politik pembangunan yang terlibat dalam membangun wisata halal di Kota Sabang sebagaimana yang

disampaikan oleh Warjio (2016) dimana cara-cara maupun strategi yang dilakukan oleh para aktor politik dalam konteks pembangunan sesuai dengan cara-cara Islam. Dalam hal ini, para aktor baik dari tingkat nasional, lokal, hingga individu dan swasta Kota Sabang sebagai penggerak pembangunan harus saling bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan arah maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai, yaitu wisata halal di Kota Sabang.

Strategi Politik Pembangunan Wisata Halal

Terdapat tiga pendekatan yang membahas mengenai strategi politik pembangunan. Adapun tiga pendekatan tersebut adalah pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up*, dan pendekatan campuran (Warjio, 2016). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dalam membangun wisata halal di Kota Sabang digunakan pendekatan campuran. Awal dari kebijakan pembangunan ini dirumuskan oleh 'orang-orang atas' atau penguasa, yakni pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI untuk merumuskan kebijakan mengenai dicanangkannya Indonesia sebagai daerah wisata halal (sebagai regulator kebijakan), yang kemudian diturunkan kepada beberapa provinsi yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal di daerahnya, salah satunya provinsi Aceh. Selanjutnya dari pihak pemerintah provinsi Aceh, akan menurunkan regulasi wisata halal tersebut kepada pihak pemerintah kab/Kota yang juga memiliki potensi wisata, termasuklah Kota Sabang. Sedangkan peran daripada aktor bawah (*bottom-up*) dalam hal ini ialah peran dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang merupakan kelompok inisiatif masyarakat mengenai betapa pentingnya kesadaran akan wisata dan dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Sabang secara langsung. Pokdarwis ini turut mendorong pembangunan atau

pelaksana untuk menuju wisata halal, misalnya dengan menjaga kebersihan pantai, membangun sarana prasarana di pantai seperti membangun arena bermain dan tempat duduk. Maka, kebijakan program wisata halal ini bukan hanya dimonopoli oleh pemerintah level atas saja, melainkan aktor level bawah turut berperan dalam sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Wisata Halal Sabang

Kota Sabang dalam menerapkan wisata halal sudah dimodali dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Tetapi, penerapan syariat Islam tersebut belum memberikan kontribusi maksimal terhadap wisata halal jika regulasi-regulasi khusus mengenai wisata halal belum diatur secara khusus di daerah tersebut. Dengan demikian, jika telah ada regulasi-regulasi khusus untuk mengaturnya, bukan perkara sulit sebenarnya untuk membangun wisata halal Sabang. Selain itu, di Kota ini juga tidak terdapat hiburan malam seperti pub, diskotik, bioskop, yang ada hanya cafe-cafe, tempat *nongkrong* di tengah Kota yang selalu ramai dengan warga Sabang, dan wisata pantai yang juga dikelilingi rumah penduduk. Kemudian, partisipasi dari masyarakat yang membentuk Pokdarwis mengenai pentingnya segmen pariwisata bagi Kota mereka sejak tahun 2013, juga turut memperbesar peluang yang ada.

Adapun mengenai tantangannya ialah berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber terkait, ditemukan hasil bahwa belum adanya keseragaman yang jelas mengenai konsep wisata halal Sabang seperti apa yang ingin dibangun, indikatornya seperti apa. Lebih lanjut, para narasumber terkait terutama pihak pemerintah Kota Sabang hanya menyebutkan bahwa akan segera dibuat konsep khusus dalam mengatur wisata halal di Kota Sabang, yang tetap sejalan dengan identitas kepariwisataan Aceh serta menjunjung nilai kearifan lokal masyarakat

Aceh yang Islami. Selain itu, sosialisasi guna memahami konsep wisata halal juga belum intens dilakukan. Pemerintah Kota terkesan belum serius menjadikan ini sebagai program utama pembangunan di Kota Sabang.

Kemudian, tantangan lainnya adalah belum adanya payung hukum berupa Qanun ataupun perwal yang mengatur mengenai hal itu. Kepatuhan para *bule* dalam mentaati peraturan yang ada dari segi berpakaian juga masih sulit. Misalnya saja di daerah wisata Iboih, telah ada himbauan untuk berpakaian sopan ketika memasuki wilayah itu, tetapi para *bule* tetap berpakaian bikini yang ditutupi dengan luaran panjang yang tipis, yang tetap memperlihatkan tubuh mereka, dan juga masyarakat sekitar Iboih yang seakan tidak peduli akan hal itu, apalagi mungkin dikarenakan daerah itu memang daerah wisata terutama bagi para *bule*.

Tantangan lain adalah belum semua masyarakat memiliki keinginan untuk mensertifikasi halal produk makanannya, atau rumah makannya, atau kafenya karena adanya anggapan bahwa masyarakat Sabang memang sudah Islam, apalagi yang perlu dihalalkan, jadi hal tersebut tidak diperlukan. Dari segi sarana dan prasarana juga masih belum baik, misalnya saja di daerah wisata Iboih, kamar mandi untuk mengganti pakaian benar-benar tidak layak digunakan, dengan kondisi pintu yang rusak dan tempat yang tidak bersih.

Dari segi akses untuk menuju ke Kota ini juga masih mengandalkan kapal cepat dan kapal lambat yang tidak banyak jumlahnya dan hanya berangkat di pagi dan sore hari, sedangkan bandar udara Maimun Saleh sudah tidak beroperasi lagi. Sebelumnya, ada dua maskapai penerbangan yang melayani rute dari Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) menuju Bandara Maimun Saleh, namun dikarenakan minimnya penumpang dan juga tidak diperolehnya izin penambahan jam operasional, maka kedua maskapai

tersebut menutup akses ke Sabang (Sindonews, 2018).

SIMPULAN

Politik pembangunan wisata halal di Kota Sabang melihat cara-cara ataupun strategi yang digunakan oleh para aktor politik pembangunan terkait dalam konteks pembangunan, sesuai dengan cara-cara Islam. Para aktor harus saling bersinergi agar sasaran pembangunan yang dituju dapat tercapai, serta harus mampu melihat peluang dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, penting bagi para aktor yang terlibat untuk menggunakan strategi pendekatan yang tepat. Adapun, aktor politik pembangunan yang terlibat dalam membangun wisata halal di Kota Sabang terdiri dari tingkat nasional hingga lokal (Kota Sabang) yaitu Kemenpar RI, MUI/LPPOM MUI, Disbudpar Aceh, MPU Aceh/LPPOM MPU Aceh, Tim Perencana Wisata Halal Aceh, WaliKota/Wakil WaliKota Sabang, Disparbud Kota Sabang, MPU Kota Sabang, Dinas Syariat Islam/WH Kota Sabang, DPRK Sabang, BPKS Sabang, MAA Kota Sabang, HPI Kota Sabang, dan FKH Teurawah Kota Sabang.

Mengenai strategi politik pembangunan menggunakan pendekatan campuran, dimana aktor atas sebagai perumus kebijakan yaitu Kemenpar RI menurunkan regulasi kebijakannya pada tingkat provinsi Aceh, kemudian diteruskan ke tingkat lokal Sabang, serta turut serta peran pokdarwis Kota Sabang untuk mewujudkan hal ini. Namun, seluruhnya tetap disesuaikan dengan daerah Sabang dan budaya Aceh yang Islami.

Sedangkan dari segi peluang wisata halal di Kota Sabang sudah cukup besar, mengingat syariat Islam sudah mengakar dalam diri masyarakat Aceh. Tinggal seberapa kuat usaha pemerintah Kota Sabang dan instansi terkait dalam menjalankannya. Kemudian dari segi tantangannya adalah munculnya anggapan

masyarakat bahwa Sabang sudah halal, lalu ingin halal yang seperti apa lagi, serta belum semua pemilik usaha mau untuk mensertifikasi halal usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohsin, A. Ramli, N. & Alkhulayfi, B.A. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Elsevier Publisher, *Tourism Management Perspectives Journal*, 19.
- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. (2016). Mari Dukung Aceh Sebagai Destinasi Wisata Halal. Diunduh di <http://disbudpar.acehprov.go.id/dukung-aceh-sebagai-destinasi-wisata-halal/> tanggal 17 Januari 2019.
- Haq, F.M. (2013). "The Significance of Partnership As A Marketing Strategy for Islamic Spiritual Tourism". *Journal of Islamic Marketing*. 5 (2).
- El-Gohary, H. (2015). Halal tourism, is it really Halal? Elsevier Publisher, *Tourism Management Perspectives Journal*. TMP-00224: 7.
- Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). (2018). Published by: A Mastercard- Crescentrating GMTI Series Report, In partnership with Ministry of Tourism, Indonesia.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmadhani, et al. (2016). *Perjalanan Aceh Menuju Kompetensi Wisata Halal Dunia 2016*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Sindonews.com. (2018). Dua Maskapai Ini Hentikan Operasional Rute Medan-Sabang. Diunduh di <https://daerah.sindonews.com/read/1352594/191/dua-maskapai-ini-hentikan-operasional-rute-medan-sabang-1541573402> tanggal 17 Januari 2019.
- Sofyan, Riyanto. (2011). *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Wawancara dengan Tgk M. Yakob Saleh (Ketua MPU Kota Sabang), 13 Juli 2018.
- Wawancara dengan Rahmadhani, M.Bus (Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh), 17 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Syukri Yusuf (Wakil Sekretaris MPU Aceh), 24 Oktober 2018.
- Wawancara dengan Nazaruddin, S.Ikom (WaliKota Sabang), 23 Oktober 2018.

Wawancara dengan Suradji Yunus (Wakil WaliKota Sabang), 12 Juli 2018.
Wawancara dengan Faisal, S.Sos, MAP (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang), 13 Juli 2018.
Wawancara dengan Drs. Marwan (Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang), 13 Juli 2018.
Wawancara dengan Adi Zulfikar (Kepala Satuan Satpol PP/WH Kota Sabang), 14 Juli 2018.
Wawancara dengan Albina, ST (Anggota DPRK Sabang), 22 Oktober 2018.
Wawancara dengan Ir. Fauzi Umar (Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS), 23 Oktober 2018.
Wawancara dengan Tgk Sulaiman Daud, S.Pdi (Wakil Ketua MAA Kota Sabang), 22 Oktober 2018.

Wawancara dengan Trisnani Murnilawati (Ketua DPC HPI Kota Sabang), 6 Agustus 2018.
Wawancara dengan Fatwa Amri (Sekretaris FKH Teurawah Kota Sabang dan Pelaku Pariwisata Taman Putro Ijo), 23 Oktober 2018.
Wawancara dengan Nur Zahri (Kepala Seksi Industri dan Ekonomi Kreatif Bidang Industri dan Tata Kelola Disparbud Kota Sabang), 12 Juli 2018.
Wawancara dengan Irwan Mahdi (Pelaku Travel Gadeng Wisata Kota Sabang), 22 Oktober 2018.
Wawancara dengan Sahrul (Pengelola Sabang Guest House), 21 Oktober 2018.